

BAB IV

MAKNA POLITIK DAN PEMILU MENURUT KAUM SALAFI MAJELIS TAKLIM RAUDLATUL AMIN DESA KETAPANG DAYA

A. Makna Politik Bagi Kaum Salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin

Sufriyadi, salah seorang jama'ah kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya memaknai politik sebagai strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dengan menggunakan segala sumber daya yang ada dan dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (bijaksana). Selain itu politik harus bertujuan untuk mengelola kepentingan umum dalam lingkup negara dengan cara-cara yang dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umum dan menghindari segala macam kerugian dengan jalan tidak melanggar syari'at Islam.¹ Kaum salafi mengatakan bahwa politik yang adil tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Secara terminologi, hal itu diberi nama *siyasah*, sedangkan *siyasah* yang adil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari'at itu sendiri.²

Cara kaum salafi berpolitik yakni dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta berperan aktif untuk tujuan bersama berdasarkan ketentuan syari'at. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Sufriyadi dengan menyatakan:

Menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya mencapai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara ikut serta secara aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan tatanan

¹Sufriyadi, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 31 Juli 2014.

²Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah...*, 22.

kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan peranan yang dimiliki dalam koridor-koridor yang dibenarkan oleh Al Qur'an dan Hadith.³

Namun menurut Sufriyadi perpolitikan di Indonesia sudah tidak sesuai dengan tujuan politik yang sesungguhnya, dengan berpendapat:

Dunia perpolitikan Indonesia lebih diwarnai oleh cara berpikir yang pragmatis dan materialistis. Segala media, sarana, dan lembaga-lembaga politik dijadikan oleh para aktornya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan.⁴

Perjuangan dalam bidang politik tampaknya memang bukan agenda utama kaum salafi karena perhatian dan keprihatinan kaum salafi berkaitan dengan masalah akidah. Menurut kaum salafi, masalah akidah umat Islam dianggap banyak menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Tuntutan kaum salafi tentang agama adalah untuk mengembalikan masyarakat ke dalam Islam yang benar dan murni, seperti yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat.

Kaum salafi menempatkan tekanan dakwah yang kuat pada pendidikan. Bukan hanya proses pendidikan akademis tetapi proses menyeluruh artinya menumbuhkan pribadi muslim yang paham agama dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dakwah kaum salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis). Dalam menjalankan dakwahnya, kaum salafi tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah*.

³Sufriyadi, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 31 Juli 2014.

⁴*Ibid.*

Oleh karena itu, kaum salafi mengkritik para fundamentalis yang memanfaatkan media politik dalam berdakwah dengan cukup keras. Penekanan kritik kaum salafi berkaitan dengan tidak pentingnya media politik sebagai metode untuk berdakwah. Hal tersebut menurut mereka merupakan cara ambisius yang mengelincirkan kaum fundamentalis. Masalah politik merupakan masalah yang cukup penting, tetapi harus dikaji lebih mendalam dasar-dasar *syar'i*-nya karena tanpa dasar itu upaya yang dilakukan akan sia-sia maka harus dipelajari dulu meskipun secara tekstual.⁵

Jadi politik secara tidak langsung menurut kaum salafi hukumnya wajib karena problema kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bernegara tidak akan berjalan tanpa adanya politik. Politik dimaknai sebagai cara atau strategi untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan Al Qur'an dan Hadith. Namun bagi kaum salafi politik bukanlah agenda utama mereka karena fokus perhatian kaum salafi pada pembentukan masyarakat secara akidah dan tauhid Islam benar sesuai tuntunan Al Qur'an dan Hadith.

Kaum salafi memang tampaknya lebih memfokuskan diri pada pembentukan masyarakat secara tauhid Islam benar sehingga kemudian segala aspek kehidupan akan dengan sendiri mengikutinya. Terkait dengan hal tersebut Ustadz Badrut Tamam berpendapat, “kalau tauhidnya sudah benar, syari'at Islam akan dengan sendirinya dilaksanakan karena masyarakat yang

⁵Sufriyadi, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 31 Juli 2014.

tauhidnya kuat akan cenderung mematuhi perintah agama.”⁶ Maka, kaum salafi mengajarkan ketaatan total kepada *manhaj* berdasar Nabi Muhammad dan *salafus shalih*. *Al Salaf* merupakan kata umum yang merujuk pada pelopor Islam yang shaleh dan semua orang yang mengikuti jalan *salafus shalih* dalam keyakinan, moral, dan tingkah laku.

B. Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amin terhadap Demokrasi

Bagi kaum salafi sistem demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia membuat rakyat memiliki kuasa penuh atas pemerintahan. Salafi sebagai bagian dari rakyat Indonesia, secara tidak langsung harus menerima penerapan sistem demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara. Salafi mengambil peranan sebagai rakyat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Salafi ikut serta merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari segala macam kerugian dan keburukan. Salafi sebagai muslim meyakini syari’at Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadith yang merupakan syari’at, aturan, petunjuk tuntunan hukum yang sempurna untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia semua bentuk kebaikan dan menjauhkan dari berbagai bentuk keburukan lahir dan batin serta dunia dan akhirat.⁷

Salafi mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada

⁶Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 19 Juni 2014.

⁷*Ibid.*

rakyat maupun penguasa, sehingga mereka menyadari kesempurnaan syari'at Allah di dalam diri manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan.⁸

Menurut kaum salafi, demokrasi seharusnya tidak diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini karena demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pemimpin tanpa tahu latar belakang orang tersebut. Pemilihan pemimpin negara juga seharusnya bukan melalui pemilihan umum. Badrut Tamam selaku ustadz kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin mengatakan:

Benar bahwa demokrasi tidak mengharamkan pemimpin non-muslim, asal dipilih oleh rakyat. Namun dengan begitu seorang pencuri, perampok, pembunuh, pezina dan orang kafir sekalipun, 'layak' dijadikan pemimpin. Demokrasi itu sendiri adalah ajaran impor dari negeri-negeri kafir yang di negeri mereka sendiri pemimpin muslim hampir mustahil terpilih. Dan membawa-bawa Islam dalam dunia demokrasi tidak produktif, tidak mencerdaskan dan hanya mengkotak-kotakan.⁹

Noorhaidi Hasan dalam tulisannya menyatakan bahwa penolakan kaum salafi terhadap demokrasi mengakibatkan kaum salafi menolak cara bernegara yang lahir dalam sistem demokrasi. Kaum salafi menolak pemilu sebagai cara untuk memilih pemimpin. Pemilu bertujuan mengetahui kehendak mayoritas, bukan kehendak Tuhan, sebagai dasar untuk memilih pemimpin dan ini merupakan amalan jahiliyah. Pemilu adalah cara musuh

⁸Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 19 Juni 2014.

⁹Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

Islam untuk menguasai umat Islam karena menyerahkan kekuasaan yang rakyat miliki kepada musuh Islam.¹⁰

Abdul Qodar Jaelani, selaku jama'ah salafi memberikan respon tentang demokrasi yang diadopsi dari pemikiran Barat dengan mengatakan:

Terlepas dari dikotomi Islam dan Barat, demokrasi merupakan sistem yang lebih banyak mendatangkan kerusakan yang seharusnya tidak diterima dalam peradaban manapun. Atas nama hak sebagai warga negara membebaskan keikutsertaan setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan segala urusan negara. Keikutsertaan rakyat yang kebanyakan tidak paham permasalahan, ditanggung oleh kepentingan kelompok-kelompok bermodal yang akhirnya menyeret rakyat dalam kehidupan feodalisme.¹¹

Sedangkan Robby Anggara (jama'ah salafi) memberikan pandangan yang cukup keras terhadap demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia dari Barat tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

Demokrasi itu apa, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apakah ada yang seperti itu? Kenyataannya pemerintahan atau kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang mempunyai kepentingan. Selama ini rakyat hanya dibodohi dan menjadi korban permainan politik para elit yang memiliki kepentingan saja. Jadi konsep tentang demokrasi itu hanyalah konsep yang semu.¹²

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, kaum salafi secara konsisten menolak sistem demokrasi untuk diterapkan di Indonesia. Karena sistem demokrasi ini merupakan sistem yang diadopsi dari pemikiran Barat yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Kaum salafi mencontohkan dalam pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) kemarin yang terdapat

¹⁰Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad...*, 151.

¹¹Abdul Qodar Jaelani, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 21 Juni 2014.

¹²Robby Anggara, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 22 Juni 2014.

banyak kecurangan seperti yang terjadi di desa Ketapang Barat pada saat pilpres atau pada saat pileg ada kecurangan di desa Bira Barat.

Meskipun menolak demokrasi, kaum salafi tetap mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada rakyat maupun penguasa.

C. Pandangan Kaum Salafi Raudlatul Amin tentang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014

Pada beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah mengadakan dua agenda pemilihan umum yakni pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). Kedua pemilihan umum (pemilu) ini merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam kedua pemilu tersebut, tidak terkecuali kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya.

Bagi kaum salafi tersebut, dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga pemimpin merupakan wakil suara mayoritas. Menurut mereka, cara seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Muslim dilarang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kaum mayoritas masyarakat karena tidak ada jaminan kaum mayoritas tidak berbuat kesalahan dan kesesatan. Mayoritas juga belum tentu berjuang untuk kejayaan Islam. Oleh karena itu, demokrasi bukan jalan yang tepat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat

Islam sekarang. Bahkan sistem ini membuka peluang untuk menciptakan kesesatan dan kerusakan.¹³

Moh. Ali Nardin, selaku jama'ah salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin mangaitkan pandangannya tentang sistem demokrasi yang dipakai saat ini di Indonesia dengan mengatakan:

Di dalam sistem demokrasi tidak dibedakan antara orang yang berkompeten dan orang yang tidak berkompeten, sedangkan kebanyakan dari rakyat adalah orang-orang yang tidak berkompeten, sehingga mustahil terhaslkan pemimpin yang memenuhi kriteria yang layak sebagai pemimpin.¹⁴

Kaum salafi memiliki pandangan sendiri terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres di Indonesia. Abdul Qodar Jaelani selaku jama'ah salafi ketika ditanya tentang pandangannya terhadap pileg mengatakan:

Pileg merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap Islam dimana dalam pileg banyak orang yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan dan melakukan segala cara untuk mencapainya.¹⁵

Baihaki Husein juga memiliki pandangan serupa dengan mengatakan bahwa:

Pileg merupakan sistem pemilihan yang banyak menimbulkan kemudharatan dimana disana banyak terjadi kecurangan dan bentuk-bentuk penyelewengan yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadith.¹⁶

Sedangkan terkait dengan pilpres, Baihaki Husein menyatakan seperti berikut ini:

¹³ Akhmad Salafudin, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 14 Juli 2014.

¹⁴ Mohammad Ali Nardin, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

¹⁵ Abdul Qodar Jaelani, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 1 Agustus 2014.

¹⁶ Baihaki Husein, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 31 Juli 2014.

Baik pileg maupun pilpres keduanya sama-sama menimbulkan banyak kemudharatan. Jadi keduanya bagi saya tidak terlalu penting sehingga saya lebih memilih golput.¹⁷

Abdul Qodar Jaelani juga memiliki pandangan yang tidak berbeda jauh dari Baihaki Husein ketika ditanya tentang pandangannya terhadap pilpres dengan menyatakan:

Pilpres merupakan mekanisme pemilihan pemimpin yang salah. Islam sudah memiliki mekanisme sendiri dalam memilih pemimpin sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat dan *salafus shalih*.¹⁸

Menurut kaum salafi pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres) menimbulkan beberapa kerusakan. Apabila diringkas beberapa kerusakan demokrasi dan pemilu itu seperti pendapat Muhammad Umar As Sewed, mantan ketua Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), kerusakan-kerusakan pemilu sebagai berikut:¹⁹

Pertama, pemilu adalah sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik) karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat), padahal yang berhak untuk itu hanya Allah. *Kedua*, apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah, meskipun bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasul-Nya. *Ketiga*, pemilu adalah tuduhan tidak langsung kepada Islam bahwa Islam tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain.

¹⁷Baihaki Husein, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 31 Juli 2014.

¹⁸Abdul Qodar Jaelani, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 1 Agustus 2014.

¹⁹Muhammad Umar As-Sewed. www.salafy.or.id/id_artikel/. (Jum'at, 20 Juni 2014 jam 13.00 WIB).

Keempat, partai-partai Islam tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang ada, meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam. *Kelima*, dalam pemilu terdapat prinsip *jahannamiah*, yaitu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat dari itu. *Keenam*, pemilu berpotensi besar menanamkan fanatisme jahiliah terhadap partai-partai yang ada.

Kerusakan-kerusakan pemilu di atas, menurut kaum salafi secara mutlak dapat direpresentasikan bahwa kaum salafi dalam pemilu, memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput). Hal ini terbukti dengan jawaban kaum salafi atas pertanyaan tentang bentuk partisipasinya dalam pemilu di Indonesia. Badrut Tamam selaku ustadz kaum salafi mengakui dengan mengatakan bahwa:

Kami (kaum salafi) tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu karena dalam proses pemilu di Indonesia terjadi banyak kecurangan-kecurangan. Kami juga melihat pemilu ini banyak menimbulkan kemudharatan untuk rakyat, misalnya seperti pemilu legislatif, kita tidak mengetahui asal-usul calonnya dan calon yang telah terpilih juga sering menyalahgunakan wewenangnya. Karena hal itu kami memilih untuk golput. Untuk pemilihan presiden (9 Juli) kami tetap memilih untuk golput, karena kami melihat dari dua calon yang bertarung kami merasa bahwa mereka tidak mengusung kepentingan Islam.²⁰

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sumardi yang mengatakan:

Menurut saya, pilihan golput adalah pilihan yang paling sesuai dengan *aqidah* (keyakinan) berdasarkan pada dalil-dalil syar'i yang menyatakan bahwa ketika seorang muslim telah mengikuti ajaran, sistem agama lain termasuk di dalamnya demokrasi dan pemilunya maka ia telah dianggap telah menyalahi ajaran agamanya. Islam yang dianggap tidak mengenal sistem demokrasi dengan cara pemilihan

²⁰Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

umum. Motivasi inilah yang kemudian mendasari kaum salafi memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemilu.²¹

Kemudian Abdul Heki (jama'ah salafi) menambahkan bahwa pilihan golput yang diambil merupakan suatu pilihan yang rasional dalam pemilu di Indonesia ini. Beliau mengatakan:

Tindakan golput yang kami lakukan mempunyai aspek pertimbangan rasional atau dapat dikatakan sebagai tindakan rasional. Golput dilakukan untuk menyelamatkan aqidah (keyakinan) karena pemilu tidak sesuai dengan ajaran Islam.²²

Meski tidak secara terang-terangan menyuarakan golput karena demi menjaga adab untuk tidak memberontak keputusan pemerintah. Salafi tetap pada pendiriannya untuk golput atau tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilu, baik legislatif maupun pemilihan presiden. Hal ini didasari atas sikapnya yang jelas-jelas menentang demokrasi beserta sarana-sarananya yang ada termasuk pemilihan umum yang digelar untuk memilih pemimpin. Alasan lain kaum salafi Raudlatul Amin memilih untuk golput adalah karena hal ini sudah merupakan konsekuensi dari apa yang diyakini selama ini. Kaum salafi Raudlatul Amin meyakini bahwa segala sesuatu yang berasal dari Barat banyak menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh untuk diikuti. Islam sudah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada Al Qur'an dan Hadith. Keyakinan untuk golput ini juga diperkuat dengan kekecewaan kaum salafi Raudlatul Amin terhadap pemerintah dan realita banyaknya praktek manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).

²¹Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

²²Abdul Heki, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

Kaum salafi memandang permasalahan aqidah (keyakinan) menjadi dasar utama untuk menolak keterlibatan di dalam pemilu. Dengan menganggap pemilu yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan menyimpang dari keyakinan (aqidah). Sehingga kemudian memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), baik dalam pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).²³ Hal ini dibuktikan dengan tidak datangnya kaum salafi ke TPS pada saat pemilihan berlangsung.²⁴

Oleh karena itu, salah satu jalan untuk memecahkan persoalan umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam karena Islam telah memberikan cara untuk memilih pemimpin. Menurut kaum salafi, Islam mengajarkan pemilihan pemimpin dilakukan oleh sebuah lembaga yang beranggotakan para cerdik (cendekiawan/ulama) dalam bidang politik dan agama yang bekerja atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Kelompok ini disebut *ahl al-halli wal 'aqdi* yang memilih pemimpin untuk dipatuhi oleh masyarakat.

Menurut kaum salafi, sistem pemilihan yang ada saat ini sangat berbeda dengan kondisi pada masa kekhalfahan setelah Rasulullah wafat. Sehingga pilihan golput atau tidak ikut memilih dalam pemilu merupakan pilihan politis yang diambil demi menyelamatkan aqidah (keyakinan). Tindakan golput yang dilakukan oleh kaum salafi ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Selain itu tindakan golput yang

²³Baihaki Husein, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

²⁴Observasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Ketapang Daya, 9 Juli 2014.

dilakukan karena adanya kekecewaan politik karena parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi tidak sesuai harapan untuk menyuarakan syariat Islam. Sebagai buktinya bahwa meskipun memiliki hak pilih dalam pileg maupun pilpres. Pada saat pemungutan suara, kaum salafi memilih untuk tidak datang ke TPS dan lebih memilih untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti pergi ke sawah.²⁵

Meskipun tidak mengakui pemilihan umum (pemilu), akan tetapi kaum salafi berpandangan bahwa tidak diperbolehkan melakukan gerakan separatisme dalam sebuah pemerintahan. Kaum salafi menekankan pentingnya taat kepada pemimpin, selama pemimpin itu memerintahkan hal yang baik dan melarang yang buruk. Namun kaum salafi menyatakan boleh tidak taat kepada pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan. Kaum salafi menerima dan mengakui pemerintahan hasil pemilu sebagai *ulil amri* (pemimpin) yang wajib ditaati selama dalam memerintah, pemimpin itu menyuruh kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kerusakan (*munkar*).²⁶

Jadi dalam hal ini, kaum salafi memang menolak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres) sebagai konsekuensi dari apa yang diyakini. Hal ini berdasarkan fakta bahwa kaum salafi pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden, meskipun terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak

²⁵Mohammad Ali Nardin, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

²⁶Abdul Heki, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).²⁷

Hal ini karena menurut kaum salafi, sistem pemilihan umum (pemilu) yang sekarang dilakukan oleh negara Indonesia tidak sama dengan sistem pemilihan pada masa *salaf as-shalih*. Menurut kaum salafi, sistem pemilihan yang dilakukan pada masa tersebut adalah dengan membentuk lembaga yang terdiri dari para cendekiawan/ulama yang menguasai bidang politik dan agama dan bekerja atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Lembaga ini kemudian disebut *ahl al-halli wal 'aqdi* yang bertugas memilih pemimpin untuk dipatuhi dan ditaati oleh rakyat.

Namun karena kaum salafi hidup di negara Indonesia dan konstitusi Indonesia mengamanatkan sistem demokrasi, maka kaum salafi mau tidak mau menerima pemerintahan hasil dari pemilu yang mereka tolak tersebut sebagai pemimpin. Menurut mereka pemimpin wajib untuk ditaati selama pemimpin tersebut melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kedudukannya sebagai rakyat Indonesia, kaum salafi mengambil peranan dengan cara menyampaikan pengajaran, pemahaman, dan nasehat kepada rakyat maupun pemimpin. Buktinya yakni dengan cara melakukan dakwah dan senantiasa mengajak umat muslim untuk berpegang teguh terhadap Al Qur'an dan Hadith Rasulullah.

²⁷Observasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Ketapang Daya, 9 Juli 2014.

D. Sikap Kaum Salafi Raudlatul Amin terhadap Pemerintah

Meskipun kaum salafi menolak mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu, namun dalam perjalanannya kaum salafi menerima pemimpin yang dihasilkan dari sistem pemilu. Kaum salafi menekankan ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip yang harus dipegang oleh umat ketika menginginkan kehidupan yang baik. Ketaatan tersebut merupakan ketaatan yang bersyarat. Apabila perintah pemimpin bersesuaian dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk ditaati. Namun, jika perintah itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak wajib taat kepadanya.

Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Baihaki Husein (jama'ah salafi), yang mengatakan bahwa:

Sesungguhnya merupakan bagian dari ketaatan kepada pemimpin apa yang Allah perintahkan, yaitu seorang muslim menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah bila tidak bertentangan dengan syari'at. Selama ia menjalankan peraturan itu berarti ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ia akan mendapat pahala atas perbuatan itu. Dan barang siapa menentanginya berarti ia membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia berdosa karenanya.²⁸

Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin merupakan perkara yang telah disepakati secara *ijma'* oleh *ahlus sunnah wal jama'ah* yang dibangun dengan dalil-dalil syari'at yang jelas dan mutawatir.²⁹ *Salafus shalih* juga memerintahkan untuk memuliakan dan mendukung

²⁸Baihaki Husein, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

²⁹Syaikh Abu Abdirrahman Fauzi Al Atsari, *Meredam Amarah terhadap Pemerintahan: Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ibrahim Muhammad Umar As Sewed (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006), 68.

penguasa serta melarang untuk mencaci maki dan merendahnya. Hal ini disinggung oleh Syaikh Al Atsari yakni:

(Terdapat sebuah) kaidah bahwa menjaga kemaslahatan umum adalah wajib. Sedangkan, kemaslahatan umum tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya kewibawaan penguasa dihadapan rakyat. Ketika rakyat berselisih (tidak taat) terhadap mereka atau mereka menghinakan penguasa maka akan hilanglah kemaslahatan tersebut.³⁰

Selain itu, ketika membicarakan tentang masalah hak-hak pemerintah Syaikh Al Atsari juga menyatakan:

Hendaklah diketahui ketinggian hak mereka dan apa yang diwajibkan untuk mereka yaitu menghormati dan memuliakannya. Hendaklah mereka diperlakukan dengan apa yang wajib untuk mereka yaitu penghormatan, pemuliaan dan apa yang Allah berikan dari pengagungan.³¹

Menurut ulama di atas, syari'at telah memberikan kepada penguasa kedudukan yang tinggi dan mewajibkan rakyat untuk menghormati, memuliakan, dan menaati dari perkara yang menunjukkan kebesaran seorang penguasa. Barang siapa yang memuliakan penguasa dengan menjaga apa yang telah ditetapkan syari'at dari hak dan kewajibannya, seperti meninggikan, menghormati, mendukung dengan tidak lepas dari *amar ma'ruf*, maka balasannya yaitu Allah memuliakannya di dunia ini, meninggikan derajatnya, dan menggerakkan hati para hamba untuk memuliakan para pemimpinnya.³²

Pendapat ulama salaf tersebut digunakan sebagai rujukan oleh kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin untuk menaati pemimpinnya, meskipun pemimpin tersebut dipilih berdasarkan sistem yang tidak sesuai dengan Islam.

³⁰Syaikh Abu Abdirrahman Fauzi Al Atsari, *Meredam Amarah...*, 82.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, 83.

Sufriyadi mengatakan, “Menaati apa-apa yang diwajibkan oleh pemerintah/pemimpin atas rakyatnya, termasuk kaum salafi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syari’at.”³³ Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Robby Anggara dengan berkata, “Menaati pemerintah dalam perkara yang *ma’ruf* dan menasehati mereka dalam perkara yang *munkar* dengan tetap menjaga etika berlaku, kemuliaan, kehormatan, dan kewibawaan pemerintah.”³⁴

Baihaki Husein menambahkan memperbaiki pemimpin bukan dengan melakukan kritik secara terbuka tetapi dilakukan dengan tanpa diketahui orang lain. Karena seorang pemimpin memiliki kewibawaan dan kehormatan yang harus dijaga. Islam tidak mengajarkan kebebasan mengkritik pemimpin sehingga hal itu menciptakan kekacauan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi sekarang. Kaum salafi sebagai bagian dari rakyat Indonesia harus mematuhi segala kebijakan pemimpin negara Indonesia, khususnya kebijakan yang baik, tidak menyalahi *amar ma’ruf nahi munkar*, dan membawa kemaslahatan.³⁵

Dalam hal ini, kaum salafi menekankan pentingnya taat kepada pemerintah (*ulil amri*) karena memang Al Qur’an memerintahkannya demikian. Menurut mereka cara taat kepada pemerintah adalah dengan menaati dalam perkara yang *ma’ruf* dan menasehati mereka dalam perkara yang *munkar* dengan tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan pemerintah.

³³Sufriyadi, Jama’ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 14 Juli 2014.

³⁴Robby Anggara, Jama’ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 14 Juli 2014.

³⁵Baihaki Husein, Jama’ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

E. Kriteria Pemimpin Menurut Kaum Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya

Al Mawardi menegaskan bahwa pemerintahan yang sah untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya, baik secara rasional maupun *syara'*. Secara rasional, tidak mungkin ada suatu negara atau daerah tanpa pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara atau daerah. Sebab jika demikian, maka masyarakat akan hidup dalam hukum rimba karena tanpa ada pihak yang mencegah terjadinya kezhaliman dan tidak ada pihak yang akan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan.³⁶

Secara *syara'*, kewajiban mengangkat pemimpin diketahui dari kesepakatan sahabat dan *tabi'in* karena para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW mereka bergegas membaiai Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi *khalifah* begitu juga pada masa-masa *tabi'in* mereka semua tidak pernah membiarkan kepemimpinan kosong. Menurut *syara'*, *imam* (kepala negara) adalah pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah duniawi dengan aturan-aturan agama, menempatkan hak-hak rakyat sesuai dengan proporsinya dan menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam Al Sulthaniyah* menyatakan bahwa mengangkat pimpinan adalah *fardu kifayah*, jika dalam suatu negara belum ada presiden maka dibentuklah dulu dewan pemilih yang terdiri dari

³⁶Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah...*, 6.

para cendekiawan muslim (*ahl al-halli wal 'aqdi*) lalu ditentukan kandidat presiden.

Dalam menentukan kriteria seorang pemimpin kaum salafi Raudlatul Amin menggunakan konsep kriteria pemimpin seperti yang digunakan oleh Imam Al Mawardi. Kriteria seorang pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin ada enam macam. Seperti yang disampaikan oleh Sumardi (ustadz salafi), seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria. Kriteria seorang pemimpin setidaknya ada enam. *Pertama*, adil dan bijaksana. *Kedua*, berilmu pengetahuan sehingga bisa membuat keputusan yang tepat terhadap berbagai masalah yang timbul. *Ketiga*, sehat inderanya baik penglihatan, pendengaran, maupun lisannya. *Keempat*, memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi rakyatnya. *Kelima*, mempunyai kecerdasan yang membuat dirinya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik. *Keenam*, anggota tubuhnya normal dan tidak cacat.³⁷

Ustadz Sumardi menambahkan selain keenam kategori di atas seorang pemimpin Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam, haruslah orang Islam itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Hadith bahwa seorang pemimpin harus beragama Islam. Beliau menyatakan bahwa:

Dari sisi ajaran Islam, hukum memilih pemimpin non-muslim adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadith serta kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.³⁸

Beberapa kriteria tersebut ditegaskan juga oleh Ustadz Badrut Tamam, dengan mengatakan:

³⁷Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

³⁸*Ibid.*

Seorang pemimpin umat itu harus memiliki enam kriteria yakni; adil, berilmu pengetahuan, sehat inderanya, anggota tubuhnya normal atau tidak cacat, mempunyai kecerdasan dalam mengelola pemerintahan, dan memiliki keberanian serta ketegasan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas menurut peneliti dalam menentukan kriteria seorang pemimpin, kaum salafi Raudlatul Amin menggunakan konsep yang disampaikan oleh Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam As Sulthaniyyah*. Dalam kitab tersebut Al Mawardi menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki enam kriteria, yaitu adil, berilmu pengetahuan, sehat inderanya, anggota tubuhnya normal atau tidak cacat, mempunyai kecerdasan dalam mengelola pemerintahan, dan memiliki keberanian serta ketegasan. Namun selain enam kriteria tersebut kaum salafi menambahkan ada satu kriteria lagi untuk seorang pemimpin negara terutama negara yang mayoritas Islam, yakni pemimpin tersebut harus berasal dari umat Islam itu sendiri. Hal ini menurut mereka merupakan perintah berdasarkan Al Qur'an dan Hadith.

Jadi menurut kaum salafi Raudlatul Amin seorang pemimpin harus memiliki beberapa kriteria. Hal ini sebagai bentuk dari kualifikasi dari seorang calon pemimpin. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin dalam memimpin sebuah negara, terutama negara Indonesia. Sehingga untuk menjadi seorang pemimpin memang benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Pemimpin juga harus beragama Islam karena dengan beragama Islam seorang pemimpin akan mendasarkan setiap langkahnya berdasarkan Al Qur'an dan Hadith.

³⁹Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

F. Mekanisme/Prosedur Pemilihan Pemimpin Menurut Kaum Salafi Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah keharusan, sehingga kekosongan pemimpin dalam sebuah negara, meski sesaat, memiliki dampak yang begitu besar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengatur persoalan kehidupan manusia merupakan kewajiban agama tertinggi, bahkan agama dan dunia tidak akan menjadi baik tanpa hal ini.⁴⁰ Dengan demikian manusia tidak bisa mengurus kepentingannya dengan baik bila tidak bersatu di bawah seorang pemimpin, kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan terlaksana tanpa adanya kepemimpinan.

Mengangkat atau memilih pemimpin pemerintah merupakan kewajiban agama dan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dimaksudkan menaati Allah dan Rasul dalam memilih pemimpin. Kepemimpinan menjadi rusak apabila mayoritas manusia mengejar kedudukan atau harta benda dengan jabatan kepemimpinannya.

Kaum salafi sendiri dalam mengangkat atau memilih pemimpin memiliki pandangan tersendiri. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadith. Menurut kaum salafi, berdasarkan sejarah Islam pemimpin dipilih melalui tiga mekanisme.⁴¹

⁴⁰Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, terj. Rafi Munawir (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 10.

⁴¹Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

Pertama, penunjukan. Mekanisme penunjukan dilakukan oleh pemimpin terdahulu dengan menunjuk seseorang yang dianggap layak untuk menggantikannya. *Kedua*, pemilihan. Mekanisme pemilihan dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kriteria tertentu, yang kemudian mereka memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin. *Ketiga*, turun-temurun. Mekanisme turun-temurun dilakukan oleh seorang pemimpin yang memberikan kekuasaannya kepada anak atau keturunannya, untuk menggantikannya.

Menurut kaum salafi, mekanisme pemilihan pemimpin yang cocok dan tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah mekanisme pemilihan. Namun mekanisme pemilihan ini tidak sama dengan mekanisme pemilu yang menyerahkan pemilihan pemimpin kepada orang banyak (suara mayoritas). Mekanisme pemilihan ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang beranggotakan para cendekiawan muslim atau ulama pakar ilmu syar'i yang dipilih sebagai perwakilan umat (rakyat) yang bertugas memilih kepala pemerintah melalui proses bai'at (pengambilan sumpah setia) dan bekerja atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya yang disebut sebagai dewan pemilih (*ahl al-halli wal 'aqdi*). Untuk konteks Indonesia, menurut kaum salafi Raudlatul Amin yang dimaksud *ahl al-halli wal 'aqdi* disini adalah misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut mereka, MUI cocok untuk menjadi perwakilan umat Islam dalam menentukan pemimpin Indonesia karena MUI terdiri dari para cendekiawan muslim dan para ulama.⁴²

⁴²Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

Meskipun sudah jelas bahwa MUI cocok untuk dianggap sebagai *ahl al-halli wal 'aqdi*, namun dalam menentukan anggota *ahl al-halli wal 'aqdi* harus melalui beberap syarat tertentu. Anggota *ahl al-halli wal 'aqdi* ditetapkan dengan syarat-syarat, antara lain:⁴³

Pertama, beragama Islam. Orang kafir (selain Islam) tidak bisa dipilih karena adanya pendapat bahwa kekuasaan yang diberikan kepada orang kafir akan menghasilkan kehancuran atau kerugian bagi kalangan muslim. *Kedua*, berakal karena seorang yang tidak sehat jiwanya, tidak bisa menduduki posisi *ahl al-halli wal 'aqdi* dan kepemimpinan umat. *Ketiga*, seorang laki-laki. *Keempat*, merdeka. Syarat ini saat ini mungkin tidak lagi relevan karena perbudakan tidak ada lagi, hanya yang menjadi pertimbangan adanya syarat ini adalah karena seorang budak tidak bisa dipilih lantaran masih menjadi tanggungan tuannya. *Kelima*, bertaqwa karena syarat seorang yang boleh menjadi pemimpin umat adalah orang yang bertaqwa yaitu seorang yang dikenal di kalangan *ahl al-halli wal 'aqdi* (cendekiawan) dengan baiknya, ketaatannya menjalankan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya, dikenal kredibilitasnya dan ketundukan kaum muslim kepadanya.

Keenam, berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dipilih sebagai kepemimpinan umat adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan ilmu yang memadai, termasuk spesialisasi dalam perkara pemerintahan. *Ketujuh*, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai manapun. Artinya seorang anggota *ahl al-halli wal 'aqdi* seharusnya mampu

⁴³Muhammad bin Abdillah Al Imam, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu* (Banyumas: Pustaka Salafiyah, 2009), 193.

bersikap independen dan netral. *Kedelapan*, baligh atau dengan kata lain adalah orang yang mempunyai usia memasuki dewasa dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

Baihaki Husein, selaku jama'ah salafi lainnya, ketika mintai tanggapan mengenai pandangan kaum salafi terhadap mekanisme pemilihan pemimpin di Indonesia, mengatakan sebagai berikut:

Dalam memilih pemimpin hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas untuk memilih calon pemimpin dan bukannya memilih pemimpin dilakukan oleh semua rakyat dimana sekian banyak rakyat Indonesia tidak semuanya mempunyai kapabilitas untuk memilih pemimpin secara tepat dikarenakan latar belakang ilmu dan pendidikan yang berbeda.⁴⁴

Sufriyadi juga memiliki pendapat yang serupa dengan Baihaki Husein, dengan mengatakan:

Pemilihan seorang pemimpin seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pemilihan, sehingga mereka mampu melihat kualitas dari para calon pemimpin. Dan bukannya pemilihan diserahkan kepada rakyat yang keadaannya tidak memiliki kapabilitas untuk memilih pemimpin. Rakyat memiliki hak untuk menjadi pengawas pemimpin namun tidak memiliki hak untuk memilih.⁴⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Ustadz Badrut Tamam dengan mengatakan sebagai berikut:

Seharusnya pemimpin dipilih oleh orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan kepemimpinan. Dengan begitu, maka akan terpilih pemimpin yang terbaik. Bukan melalui suara terbanyak, karena rakyat pasti memilih berdasarkan kecondongan perasaan, fanatisme golongan atau informasi sekilas semasa kampanye yang sesungguhnya jauh dari cukup untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib suatu bangsa.⁴⁶

⁴⁴Baihaki Husein, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 13 Juli 2014.

⁴⁵Sufriyadi, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 14 Juli 2014.

⁴⁶Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

Kualifikasi dalam pemilihan pemimpin hanya bersifat administratif yang tidak kualitatif, seperti minimal lulusan SMA, tidak memiliki gangguan kesehatan, didukung berapa persen dari anggota parlemen, dll. Siapapun bisa menjadi pemimpin asalkan dia mampu meyakinkan publik atas kepemimpinannya, tanpa mengaitkan dengan moral dan agamanya. Hal tersebut di atas, diperparah dengan perilaku pemilih yang tidak mempertimbangkan pilihannya secara rasional. Budaya politik uang, fanatisme golongan bahkan kaburnya informasi kredibilitas pemimpin mewarnai demokrasi di Indonesia. Selain itu, untuk melahirkan seorang pemimpin harus melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kualitas personal pemilih.⁴⁷

Berdasarkan realita di atas, kaum salafi berpandangan terpaksa hidup dalam iklim demokrasi. Dalam situasi tersebut, kaum salafi diwajibkan untuk tetap menaati pemimpin dan diminta bersabar dengan segala kekurangan pemimpin. Kemiskinan, kesenjangan keadilan, KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dipertontonkan setiap hari pada rakyat, sehingga kepentingan kesejahteraan bagi rakyat kurang tersentuh.⁴⁸

Dengan pemaparan di atas, jelaslah bahwa kaum salafi menolak mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan kekurangan-kekurangannya seperti yang disebutkan di atas. Menurut kaum salafi, pemilihan pemimpin seharusnya dilakukan oleh lembaga yang terdiri dari para cendekiawan muslim sebagai perwakilan umat (rakyat) yang bertugas memilih

⁴⁷Badrut Tamam, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 12 Juli 2014.

⁴⁸Akhmad Salafudin, Jama'ah Salafi, *Wawancara*, Sampang, 14 Juli 2014.

pemimpin atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya melalui al-Qur'an dan Hadith. Dengan begitu, maka akan terpilih seorang pemimpin yang memiliki kualifikasi seperti yang disebutkan oleh Imam Al Mawardi dan diamini oleh kaum salafi yaitu adil, cerdas, sehat secara jasmani dan rohani, berani dan tegas, taat kepada agama, dan menguasai pengelolaan pemerintahan serta yang terpenting beragama Islam.

Selain itu menurut kaum salafi Raudlatul Amin, lembaga yang cocok untuk menjadi *ahl al-halli wal 'aqdi* adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut mereka, MUI cocok untuk menjadi perwakilan umat Islam dalam menentukan pemimpin Indonesia karena MUI terdiri dari para cendekiawan muslim dan para ulama. Sehingga dengan demikian, maka MUI akan bekerja berdasarkan Al Qur'an dan Hadith. Selama ini MUI menurut mereka hanya sebagai sebuah lembaga yang sifatnya sebagai bantuan untuk pemerintah melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, peran MUI harus lebih dimaksimalkan sebagai lembaga yang merupakan perwakilan dari seluruh umat Islam di Indonesia.

G. Tipologi Gerakan Kaum Salafi Raudlatul Amin

Berdasarkan teori gerakan keagamaan khususnya Islam yang disampaikan oleh William E Shepard dalam tulisannya "*Islam and Ideology: Toward A Typology*", kaum salafi Raudlatul Amin dapat diklasifikasikan ke dalam gerakan neo-tradisionalisme karena mengajak kembali kepada kemurnian ajaran, yakni ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadith.

Kaum salafi begitu selektif terhadap kultur yang berkembang di masyarakat guna mewujudkan tatanan yang mereka diinginkan. Meski tergolong kelompok fundamentalis, karena mengajak kembali kepada ajaran agama yang fundamental, kaum salafi berbeda dengan gerakan-gerakan dakwah yang lain.

Tipologi kaum salafi ini juga ditegaskan oleh Bernard Haykel. Menurut Bernard Haykel, kaum salafi memiliki beberapa karakter yang unik dan berbeda dengan gerakan-gerakan Islam yang lain, antara lain:⁴⁹

Pertama, kebanyakan salafi bukanlah aktor politik. *Kedua*, terjadinya reformasi sosial dan agama menjadi perhatian utama. *Ketiga*, kaum salafi bisa dikenal dari cara berpakaian, perilaku agama, cara shalat dan cara berbicaranya. Hal itu sebagai wujud dari munculnya kesadaran melaksanakan perintah agama. *Keempat*, menekankan untuk merujuk kepada Al Qur'an dan Hadith. *Kelima*, terbatasnya hierarki dalam memahami ajaran Islam. Artinya kaum salafi dalam mencari dasar-dasar agama untuk memperteguh keyakinan mereka, tanpa melewati hierarki yang begitu rumit. *Keenam*, tidak dibatasi oleh wilayah dan tidak pula fundamentalis. *Ketujuh*, senantiasa mendasarkan segala perilaku dan pandangan dengan merujuk pada teks yang bersumber dari wahyu, Al Qur'an dan al-Hadith. Contoh empiris, mereka begitu taat terhadap pemerintah dan tidak pernah melakukan kritik secara terbuka. Hal ini tentu berbeda dengan gerakan fundamentalis lain yang melakukan kritik secara terbuka, dan bahkan mengkafirkannya ketika pemerintah tidak menjalankan hukum Allah.

⁴⁹Bernard Haykel, *Revival and Reform in Islam...*, 24-37.

Hal di atas sesuai dengan tujuan dakwah kaum salafi Raudlatul Amin yang ingin mempertahankan Islam secara murni dan sesuai dengan Islam dalam Al Qur'an dan Hadith serta praktek *salafus shalih*. Kaum salafi Raudlatul Amin bukan gerakan organisasi massa yang berorientasi pada politik, karena lebih mengutamakan pelebagaan Islam dalam masyarakat secara murni. Kaum salafi Raudlatul Amin mendukung pemerintahan Indonesia, selama tidak menyalahi syari'at yang tertulis dalam Al Qur'an dan Hadith.

Kaum salafi Raudlatul Amin menginginkan perubahan, dengan dakwah Islam, dari akar masyarakat yang paling bawah dan dimulai dari level individual dan transformasi personal. Kaum salafi Raudlatul Amin hanya berusaha untuk melakukan purifikasi (pemurnian) terhadap Islam. Kaum salafi menginginkan penerapan Islam dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya dikategorikan sebagai gerakan neo-tradisionalisme Islam.